

KEARIFAN LOKAL “MAKIRIWO” DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE LIVELIHOOD* (Studi Kasus Petani Kelapa Desa Apulea, Kabupaten Halmahera Utara, Indonesia)

Local Knowledge “Makiriwo” in The Sustainable Livelihood Perspective (Case of Apulea Coconut Farm Community in North Halmahera Regency, Indonesia)

Yosafat Kotalaha^{1*)}, Gatot Sasongko¹

¹Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana

^{*)E-mail: josafat_kotalaha@yahoo.co.id}

ABSTRACT

This study aims to describe a portrait of Apulea community in North Halmahera District which is located in the border region between Indonesia-Philippines and North Halmahera-West Halmahera District. This study uses a qualitative method with a case study approach that specifically describes a survival strategy for the sustainability of the livelihoods of coconut farmers in the village of Apulea in North Halmahera Regency, Indonesia. Retrieval of research data using in-depth interview techniques, document observation and study. The informants involved in this study were selected selectively based on livelihoods and experience using social capital and cultural capital as a strategy to achieve livelihood sustainability. The results of this study indicate that local knowledge makiriwo is embodied in natural resource capital and social capital that is used to sustain life amid barriers to access to financial capital, physical capital and human capital.

Keywords: Local Knowledge, Livelihood, Sustainability of Livelihoods, Apulea village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan potret kehidupan masyarakat desa Apulea di Kabupaten Halmahera Utara yang terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina sekaligus perbatasan Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang secara spesifik menguraikan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup petani perkebunan kelapa Desa Apulea di Kabupaten Halmahera Utara, Indonesia. Pengambilan data penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini dipilih secara selektif berdasarkan latar belakang mata pencaharian dan pengalaman yang relevan dengan konteks penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal *makiriwo* terjewantahkan dalam modal sumber daya alam dan modal sosial yang dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup di tengah hambatan akses terhadap modal finansial, modal fisik dan modal manusia.

Kata Kunci: kearifan lokal, penghidupan, keberlanjutan mata pencaharian, Desa Apulea

PENDAHULUAN

Perbedaan konteks pembangunan menunjukkan adanya perbedaan strategi bertahan hidup maupun strategi coping petani untuk keberlanjutan mata pencaharian. Sembiring dan Dharmawan (2014) menunjukkan adanya perbedaan aspek pembentuk strategi nafkah di Dusun Klaces dan Dusun Lempong Kabupaten Cilacap. Disisi lain, Elis (2000) juga menunjukkan hal yang berbeda terkait dengan aspek pembentuk strategi nafkah yakni on-farm, off-farm, dan non-farm. Hal ini menunjukkan adanya peluang penelitian yang secara kontekstual dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara khusus kajian tentang *livelihood*. Mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan *livelihood* petani kelapa di wilayah terpencil, yakni wilayah perbatasan dan pedesaan.

Kearifan lokal *Makiriwo* dalam perspektif *sustainable livelihood* untuk mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian sebagai petani perkebunan kelapa menjadi penting untuk diteliti secara mendalam mempertimbangkan adanya kesenjangan dalam penelitian terdahulu yang secara kontekstual

memperkuat argumen bahwa kearifan lokal sebagai rekonstruksi gagasan masyarakat untuk mempertahankannya sekaligus menjaga keberlanjutan hidup dalam konteks pembangunan. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk menguraikan *livelihood* petani kelapa di Desa Apulea, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia yakni pemanfaatan jejaring, kepercayaan, nilai-nilai bersama dalam ranah kebudayaan untuk keberlanjutan mata pencaharian petani kelapa di era Revolusi Industri 4 sebagai tantangan globalisasi dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kehidupan petani di wilayah pedesaan khususnya di daerah perbatasan negara Indonesia, tidak terlepas dari fenomena kemiskinan sejak adanya krisis ekonomi. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian nafkah petani perkebunan skala kecil (plasma) dalam menyasati krisis ekonomi. Adapun, nafkah ganda menjadi perilaku atau praktik ekonomi yang dominan dimanfaatkan petani perkebunan miskin sebagai bentuk strategi bertahan hidup. Dalam konteks Indonesia, Sumarti (2007) menunjukkan bahwa subsektor perkebunan yang didominasi perkebunan rakyat telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi krisis di Indonesia. Bahkan pada krisis ekonomi, perkebunan rakyat mengalami peningkatan kesejahteraan

meskipun terjadi depresiasi rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan rakyat menjadi sumber pertumbuhan dan perbaikan distribusi pendapatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Upaya untuk mempertahankan kontribusi perkebunan rakyat dalam hal pertumbuhan dan pemerataan pendapatan, tidak terlepas dari permasalahan harga produk perkebunan primer serta harga input yang berimplikasi pada keuntungan usaha sehingga produktivitas perkebunan rakyat relatif rendah. Hal ini tidak terlepas dari faktor kelembagaan yang menyebabkan permasalahan sosial maupun ekonomi sehingga usaha pertanian dan produktivitasnya terhambat. Adapun, krisis moneter serta krisis ekonomi politik yang berlangsung pada tahun 1998 di Indonesia meskipun telah mengalami proses pemulihan, implikasinya masih relevan dengan konteks wilayah perbatasan khususnya daerah terluar. Implikasi krisis ekonomi bagi masyarakat pedesaan ialah meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli serta peningkatan populasi penduduk di bawah garis kemiskinan. Selain itu, dampak krisis ekonomi ialah krisis moral serta disintegrasi sosial (peningkatan kriminalitas dan ketimpangan sosial). Sementara itu, dalam konteks perkebunan rakyat, implikasi krisis ekonomi terhadap ekologi lingkungan ialah pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal. Dalam perspektif kelembagaan, permasalahan semacam ini muncul akibat interaksi dengan supra desa yang bekerja atas kekuatan pasar sehingga petani lapisan atas dan pedagang yang mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan petani kecil.

Mempertimbangkan adanya dinamika dalam mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian petani di wilayah perbatasan Indonesia-Philipina khususnya Desa Apulea, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan kearifan lokal *Makiriwo* dalam perspektif *sustainable livelihood* untuk keberlanjutan mata pencaharian petani kelapa. Adapun perspektif kelembagaan terkait dengan *livelihood* digunakan untuk mengamati kelembagaan ekonomi lokal yakni strategi nafkah ganda rumah tangga petani kelapa dalam praktik *Makiriwo* untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup yang berkelanjutan.

Keberlanjutan mata pencaharian dalam perspektif Chambers and Conway (1992) memberikan gambaran secara kontekstual yakni mata pencaharian masyarakat pedesaan dan aspek keberlanjutannya dengan memanfaatkan 5 (lima) modal penghidupan terdiri dari modal manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*), modal sumber daya alam (*natural capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal finansial (*financial capital*). Konsep yang dikemukakan oleh Chambers dan Conway (1992) ini dapat digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis kondisi mata pencaharian rumah tangga petani kelapa di Desa Apulea.

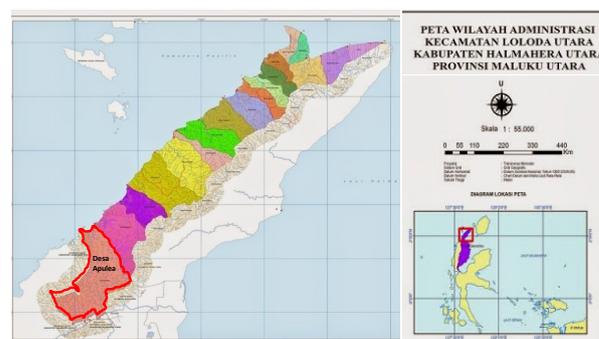
METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2015; Emzir, 2012; Moleong, 2011). Data yang dikumpul dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen pemerintah desa maupun pemerintah daerah serta lembaga terkait seperti data statistik dan sebagainya. Proses penetapan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball* untuk menemukan informan kunci. Adapun, hasil wawancara mendalam direkam dalam bentuk transkrip hasil wawancara

yang dikelola dalam bentuk matriks hasil transkrip wawancara menggunakan teknik triangulasi untuk menyesuaikan adanya kesesuaian antara hasil wawancara dengan hasil observasi maupun studi dokumen.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Philipina yakni di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Lebih spesifik, lokasi penelitian ini terletak di Desa Apulea Kecamatan Loloda, yang dapat digambarkan dalam peta lokasi penelitian sebagai berikut.



Sumber : Sistem Informasi Geografi. 2015. Peta Administrasi Kecamatan Loloda Utara.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Secara administratif, Desa Apulea terletak di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Meskipun demikian, Desa Apulea juga terletak di perbatasan wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Luas wilayah Desa Apulea ialah 5.192,85 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 442 jiwa. Jumlah laki-laki sebanyak 226 jiwa dan perempuan sebanyak 216 jiwa. Selain itu, jumlah Kepala Keluarga yang terdokumentasi sebesar 104 (RPJMDes 2015-2020). Aksesibilitas jalan darat dari ibukota Kabupaten Halmahera Utara maupun ibukota Kabupaten Halmahera Barat belum tersedia, sehingga transportasi laut menjadi satu-satunya akses menuju ibukota Kabupaten. Akses komunikasi yang belum tersedia, membuat masyarakat Desa Apulea kesulitan berkomunikasi dengan penduduk di ibukota Kabupaten Halmahera Utara. Adapun, alokasi waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan laut dari ibukota Kabupaten Halmahera Utara menuju Desa Apulea membutuhkan waktu 6 (enam) sampai 7 (tujuh) jam perjalanan menggunakan kapal kecil (transportasi tradisional yang dikenal dengan istilah *longboat* atau *motor*).

Secara geografis, Desa Apulea merupakan wilayah pesisir karena pemukiman penduduk yang dekat dengan pesisir pantai. Meski demikian mata pencaharian masyarakat tidak hanya sebagai nelayan melainkan sebagai petani perkebunan kelapa. Keterbatasan aksesibilitas dan transportasi menuju ibukota Kabupaten Halmahera Utara, membentuk mekanisme sosial ekonomi masyarakat lokal dalam mempertahankan hidup melalui strategi nafkah ganda. Kondisi ini menarik untuk dikaji secara mendalam dengan pendekatan *livelihood*. Hal-hal yang menarik untuk diuraikan secara mendalam dalam kajian ini ialah kearifan lokal *makiriwo* dalam perspektif *sustainable livelihood* untuk mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian.

Pengambilan dan Pengolahan Data Penelitian

Proses pengambilan dan pengolahan data dilakukan secara

seksama untuk memperoleh informasi yang kredibel dan valid. Adapun, pemilihan informan dilakukan secara selektif sehingga data yang diperoleh tidak bias untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait tindakan ekonomi, strategi nafkah ganda dan budaya sebagai strategi mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian petani kelapa di Desa Apulea.

Teknik pengambilan data yang digunakan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam, wawancara dilakukan bersama informan yang telah diseleksi mempertimbangkan kriteria yang sesuai dengan konteks penelitian. Pada tahap penajakan, peneliti menggunakan teknik *snowball* yakni wawancara *door to door* menggunakan karakteristik sosial-budaya lokal sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat lokal sebelum melakukan wawancara penelitian. Adapun, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, studi dokumen yang dimaksudkan ialah kajian data statistik yang didokumentasikan oleh Pemerintah Desa Apulea terkait dengan data petani perkebunan kelapa maupun data lain yang relevan dengan konteks penelitian ini.

Informan kunci yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yakni Rein Terere (72 Tahun), Ribens Datty (64 Tahun), Simson Wadui (81 Tahun), dan Ayub Botara (46 Tahun). Penetapan keempat informan sebagai informan kunci dilakukan secara selektif mempertimbangkan latar belakang informan sebagai petani serta pengalaman dalam perkebunan kelapa sejak usia muda yang diwariskan oleh orang tua secara turun temurun. Selain itu, informan kunci merupakan keluarga dari pemimpin desa yang memahami persoalan sosial, budaya dan ekonomi Desa Apulea. Dalam daftar kepemimpinan masyarakat Desa Apulea sejak tahun 1912-1947 dikenal sebagai Kimalaha, Bubady Datty telah menjadi pemimpin masyarakat Desa Apulea. Sebagai pemimpin pada saat itu, perkebunan kelapa telah menjadi mata pencaharian rumah tangga untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup. Pekerjaan sebagai petani perkebunan kelapa secara turun temurun diwariskan kepada Yoel Datty yang menjabat sebagai Kimalaha pada tahun 1947-1965.

Selanjutnya, kepemimpinan diwariskan kepada Ribens Datty sebagai generasi penerus untuk mengelola perkebunan kelapa. Selain itu, informan kunci Simson Wadui merupakan keturunan Kepala Desa yang dikenal dengan istilah Hamente (1966-1979) serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan Yeremias Wadui sebagai Kepala Desa (2000-2004). Pengalaman sebagai petani kelapa telah dimulai sejak usia muda karena pekerjaan sebagai petani perkebunan kelapa telah dimulai sejak dahulu oleh generasi sebelumnya. Demikian halnya Ayub Botara sebagai Kepala Desa sejak tahun (2005-2017) yang juga memiliki pengalaman bekerja sebagai petani kelapa sejak usia muda.

Masing-masing informan memiliki latar belakang pendidikan tertinggi pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan SMU serta pendidikan terendah ialah Sekolah Dasar (SD). Pekerjaan sebagai petani kelapa masih bersifat tradisional serta mengalami kendala untuk mengakses pasar yang lebih luas sehingga kopra yang dihasilkan selalu dijual kepada pedagang pengumpul (pengepul) di dalam desa. Hambatan tersebut berimplikasi pada tekanan ekonomi saat terjadi fluktuasi harga kopra. Kondisi ekonomi yang lemah serta keterbatasan akses transportasi dan komunikasi menjadi penghambat peningkatan pendidikan masyarakat setempat.

Proses adaptasi bersama masyarakat Desa Apulea membutuhkan

waktu yang cukup lama. Pada pendekatan awal dibutuhkan waktu selama satu bulan untuk menyesuaikan diri dengan budaya setempat.



Gambar 2. Transportasi Laut Masyarakat Desa Apulea

Kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal menunjukkan adanya kerjasama antar petani kelapa yang dikenal dengan istilah gotong royong (*makiriwo*). Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup dilakukan dengan strategi nafkah ganda. Masyarakat Desa Apulea memiliki mata pencaharian alternatif baik sebagai nelayan dan melakukan tindakan ekonomi berupa diversifikasi tanaman produktif untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam konteks budaya lokal.

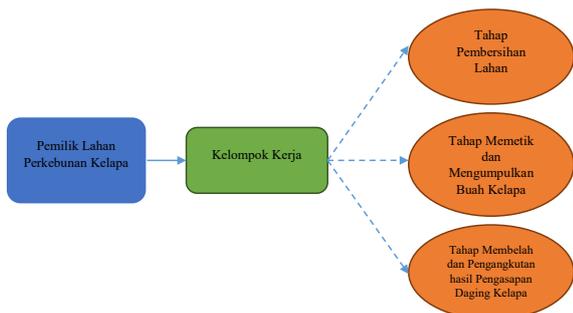
HASIL DAN PEMBAHASAN

Makiriwo Petani Kelapa Desa Apulea

Mardiyaningsih, *et.al.* (2010) dalam penelitiannya tentang dinamika sistem penghidupan masyarakat tani tradisional dan modern di Jawa Barat, menghubungkan kelembagaan sosial asli masyarakat pedesaan dalam menjamin sistem penghidupan masyarakat. Pandangan tersebut berawal dari adanya gagasan tentang konseptualisasi perubahan sosial pada masyarakat tani yang tidak terlepas dari perubahan dimensi etika sebagai dasar sistem kehidupan sosial bermasyarakat. Penelitiannya menunjukkan adanya intervensi kebudayaan lokal yakni Kasepuhan Sinar Resmi yang mampu mempertahankan eksistensi sistem penghidupan tradisional tanpa menutup diri dari arus modernisasi. Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa falsafah hidup “ibu bumi bapak langit dan tanah ratu” komunitas kasepuhan dalam menjalankan aktivitas nafkah terutama di bidang pertanian dan ekstraksi sumber daya alam mampu mempertahankan keberlanjutan nafkah rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Apulea, kearifan lokal *makiriwo* menempati posisi penting dalam mempertahankan hidup petani kelapa. Praktik *makiriwo* juga dikenal sebagai pemanfaatan modal sosial dan modal budaya untuk keberlanjutan mata pencaharian. Bagi masyarakat petani kelapa di Desa Apulea menjadi solusi untuk meringankan beban kerja petani kelapa dalam proses menghasilkan kopra. Dengan adanya *makiriwo*, proses produksi yang membutuhkan tenaga kerja upahan dalam jumlah banyak dan biaya yang relatif tinggi, dapat diatasi dengan pendekatan kelembagaan ekonomi lokal yang secara kolektif mengkombinasikan pendekatan kekerabatan atau kekeluargaan dalam tindakan ekonomi petani kelapa. Hal ini menunjukkan bahwa, praktik *makiriwo* memobilisasi interaksi sosial antar individu di Desa Apulea dengan memperluas jejaring sosial, menumbuhkan norma-norma atas dasar kebersamaan serta meningkatkan kepercayaan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal tersebut nampak dalam sistem kerja

Makiriwo petani kelapa di desa Apulea, sebagai berikut.



Gambar 3. Sistem Kerja Makiriwo Petani Kelapa Desa Apulea

Dalam konteks Desa Apulea, pemilik lahan perkebunan kelapa merupakan petani kelapa. Meskipun memiliki lahan perkebunan kelapa yang luas, pemilik lahan juga turut bekerja dalam menghasilkan kopra. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Apulea, *makiriwo* merupakan praktik kebudayaan lokal yang secara kolektif disepakati oleh para sepeuh Desa Apulea untuk membantu salah satu anggota masyarakat menyelesaikan pekerjaannya.

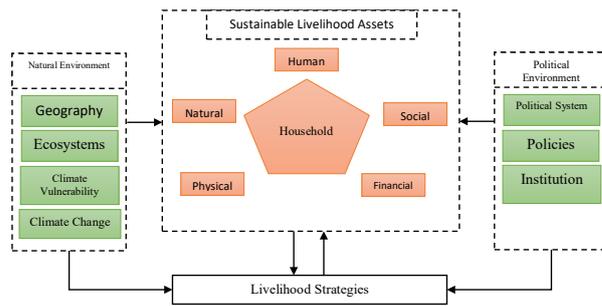
Praktik *makiriwo* petani kelapa di Desa Apulea dapat digambarkan sebagai berikut: setiap petani kelapa yang memiliki lahan, memiliki waktu panen yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, interaksi sosial antar petani membentuk ikatan sosial yang kuat sehingga diakomodir dalam bentuk kelembagaan ekonomi lokal yakni kelompok kerja. Apabila salah satu anggota kelompok kerja hendak menghasilkan kopra, maka anggota kelompok lainnya akan berperan sebagai pekerja upahan yang bertanggungjawab membersihkan lahan perkebunan kelapa, memetik dan mengumpulkan buah kelapa serta membelah dan melakukan proses pengangkutan hasil pengasapan daging kelapa. Sementara itu, pemilik lahan perkebunan kelapa akan bekerja secara bersama-sama pada tahap pengangkutan kopra hasil pengasapan yang akan dijual kepada pengepul. Adapun, hasil penjualan kopra kepada pengepul akan dibayarkan sesuai upah kerja kelompok dengan biaya relatif murah sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan kelompok kerja. Setelah itu, pemilik lahan perkebunan kelapa yang telah melakukan proses panen dapat berperan menjadi anggota kelompok kerja dan membantu anggota lainnya yang mendapatkan giliran panen berikutnya.

Praktik *makiriwo* merupakan kearifan lokal warga Desa Apulea yang diwariskan secara turun temurun untuk meringankan tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Interaksi sosial dalam praktik *makiriwo* menimbulkan nilai-nilai budaya baru yang dikonstruksi secara kolektif tentang kehidupan sosial bermasyarakat. Lingkungan sosial komunitas yang terisolir karena keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, justru memberikan ruang bagi penguatan kelembagaan ekonomi lokal dalam konteks *makiriwo*. Dengan demikian, kepercayaan antar petani dalam kelompok kerja semakin kuat. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring, norma dan kepercayaan bagi masyarakat dalam ruang yang terisolir memperkuat akumulasi modal sosial sehingga dapat dimanfaatkan dan dikonversi menjadi modal ekonomi.

Modal *Livelihood* Petani Kelapa Desa Apulea

Keterbatasan petani kelapa di Desa Apulea dalam mengakses modal untuk mencapai keberlanjutan mata pencaharian dalam konteks *livelihood* yang diadaptasi dari pemikiran Chambers dan Conway (1992) dapat digambarkan seperti pada gambar

4 berikut ini.



Sumber : Kerangka *sustainable livelihood* yang diadaptasi dari Chambers and Conway (1992)

Gambar 4. *Sustainable Livelihood Assets*

Keberlanjutan mata pencaharian dalam perspektif Chambers and Conway (1992) memberikan gambaran secara kontekstual yakni mata pencaharian masyarakat pedesaan dan aspek keberlanjutannya. Untuk memahami pelbagai permasalahan terkait keberlanjutan mata pencaharian di desa, konsep yang dikemukakan oleh Chambers dan Conway (1992) dapat digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis kondisi mata pencaharian rumah tangga petani kelapa di desa Apulea.

Modal Manusia

Modal manusia adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan produktivitas seseorang. Modal manusia pada penelitian ini menunjuk pada latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman petani Desa Apulea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, petani kelapa desa Apulea rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan sangat sedikit berpendidikan tinggi yakni Sekolah Menengah Atas (SMA / SMU), dan mayoritas petani kelapa tradisional dan hanya mengandalkan kepala keluarga dalam mencari nafkah. Selain itu petani kelapa di Desa Apulea masih belum memiliki pemahaman terkait dengan inovasi produk berbahan dasar kelapa maupun pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan proses produksi kopra yang berkualitas. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh Ayub Botara (46 tahun) sebagai pendukung argument terkait modal manusia di Desa Apulea :

Bahasa lokal: *“Kami disini paling tinggi sekolah itu hanya SMA, itupun hanya satu dua, paling banyak itu SD bahkan ada yang tidak sekolah, semua kepala keluarga sebagai pekerja petani kelapa, juga torang mangael untuk torang pe makan hari-hari, jadi torang pehasil itu menunggu kuartal kelapa”*.

Bahasa Indonesia: *Kebanyakan kami sebagai petani berpendidikan SD bahkan ada yang tidak selesai SD dan hanya sedikit yang berpendidikan SMA, semua kepala keluarga adalah pekerja petani kelapa, dengan hasil kopra yang dikerjakan 4 bulan sekali atau kuartal dan kami juga melaut untuk kebutuhan keseharian kami.*

Wawancara bersama Ribens Datty (64 Tahun) pada tanggal 9 Oktober 2017:

Bahasa Lokal (Desa Apulea): *“Maneoka ja nako ua, de isiodaka wasi kokowo de okia puniti bisa imadadi pipi, jadi ka misalnya nanga keluarga de nako nyawa ima gajako woja gao, jadi ma puniti ka wosi jowo to, nako maruka dai Sulawesi ona ja lewang nako maneisa jo siodakua”*.

Bahasa Indonesia: *“Disini kami tidak tahu sama sekali,*

bagaimana mengelola atau memanfaatkan bahan dari pohon kelapa menjadi produk yang lain seperti tempurung atau sabutnya. Proses produksi kopra kami berbeda dengan tempat lain, di tempat kami, tempurung dan sabut kelapa masih digunakan untuk pengasapan. Proses menghasilkan kopra tidak menggunakan cara lewang seperti di Sulawesi atau di tempat lain, kami masih tradisional”.

Mardi (2011) dalam penelitian tentang konversi waduk Wonogiri, menunjukkan bahwa modal manusia yang memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman di bidang pertanian sangat penting dalam mengelola sumber daya alam secara optimal dan berkualitas untuk keberlanjutan penghidupan petani. Selanjutnya, (Barro, 1991; Mankiew *et al.* 1992), membuktikan bahwa modal manusia yang diukur melalui indikator pendidikan, berpengaruh positif terhadap output perkapita.

Schultz (1961) menyatakan bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal, sebagaimana modal fisik dan teknologi. Modal manusia adalah dimensi kualitatif dari sumber daya manusia seperti keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang akan memengaruhi kemampuan produktivitas orang tersebut. Sedangkan Acemoglu dan Autor (2005) serta Anwar (2017) mengatakan modal manusia sebagai suatu hal yang berhubungan dengan bekal pengetahuan atau karakteristik pekerja yang dimiliki (baik bawaan atau diperoleh) yang memberikan kontribusi “produktivitas”. Dalam pendekatan penghidupan (*livelihoods approach*) modal manusia (*people center*) memiliki perhatian pertama dan utama sebagai subyek yang penting. Hal ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam memperoleh akses yang lebih baik terhadap kondisi penghidupan mereka. Rumah tangga petani yang hanya mengandalkan pada satu orang sebagai pencari nafkah, dan keterbatasan kemampuan mengelola sumber daya karena rendahnya pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sangat rentan dengan kemiskinan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan dalam pengelolaan perkebunan kelapa di Desa Apulea menyebabkan terjadinya tekanan ekonomi atau hambatan akses terhadap modal finansial. Hambatan akses terhadap modal finansial berimplikasi pada akses terhadap modal manusia dan modal fisik, demikian halnya hambatan akses terhadap modal fisik berimplikasi pada modal manusia dan modal finansial. Dalam konteks petani Desa Apulea, modal finansial, modal fisik dan modal manusia memiliki hubungan kausalitas satu sama lain.

Petani Desa Apulea saat ini mewarisi perkebunan kelapa milik generasi sebelumnya, oleh sebab itu akses terhadap modal sumber daya alam telah dimiliki. Selanjutnya, kearifan lokal *makiriwo* yang diwariskan oleh generasi sebelumnya merupakan modal sosial petani kelapa di Desa Apulea yang mampu memperluas jejaring sosial, menumbuhkan nilai-nilai atas kepentingan bersama serta kepercayaan kepada sesama. Dengan adanya *makiriwo* proses produksi yang membutuhkan tenaga kerja upahan dalam jumlah yang banyak dan biaya yang relatif tinggi dapat diatasi dengan pendekatan kekerabatan dan kekeluargaan.

Modal Sumber Daya Alam

Sumber daya alam mempunyai peran cukup penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Begitu pentingnya sumber daya alam bagi manusia dalam pembentukan peradaban kehidupan bagi manusia, sehingga setiap manusia memiliki

konsepsi dan pandangan tersendiri dalam penguasaan dan pengelolaannya (Hidayat, 2011). Bagi masyarakat desa Apulea, modal sumber daya alam berupa tanah dan laut di manfaatkan untuk keberlanjutan mata pencaharian petani dengan bercocok tanam tanaman hortikultura, kelapa, pala dan cengkeh serta melaut (nelayan) yang dilakukan secara tradisional dan subsisten. Berikut kutipan wawancara : Simson Wadui (81 tahun) :

Bahasa Lokal: “*Kami disini dusun kelapa itu ada yang peninggalan orang tua tapi ada juga kami tanam sendiri, selain menanam kelapa, berkebun bermacam kebutuhan makan hari-hari, kami juga menanam pala dan cengkeh tapi untuk pala dengan cengke sangat terbatas yang paling banyak itu hasilnya kopra juga mengail untuk makan hari-hari, jika ada lebih kita jual, tapi paling banyak itu hanya untuk makan. Juga dusun kelapa itu tempatnya beda-beda jika hanya sendiri kerja pasti terlambat, belum lagi kebun itu ada yang jauh dan digunung-gunung dan kelapa itu biasanya kami kerja 4 bulan sekali”.*

Bahasa Indonesia: Kami memiliki lahan kelapa yang sebagian merupakan warisan orang tua dan juga usaha kami sendiri, selain sebagai petani kelapa yang menghasilkan kopra sebagai komoditi unggulan, areal perkebunan kelapa kami ada yang berada di tempat yang jauh dan berbukit atau berlereng sehingga kami kesulitan mengerjakannya bersamaan ketika masa panen, proses panen kelapa membutuhkan 4 bulan sekali, selain itu kami juga menanam pala dan cengkeh tetapi jumlah tidak banyak. Untuk memenuhi nafkah sehari-hari kami memanfaatkan alam sekitar untuk menanam tanaman bulanan dan juga melaut.

Hal ini menunjukkan bahwa petani perkebunan kelapa desa Apulea, dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya walaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia, namun memanfaatkan sumber daya alam juga mempraktikkan strategi nafkah ganda rumah tangga, seperti menanam tanaman produktif lainnya serta menjadi nelayan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Petani kelapa di Desa Apulea mempertimbangkan masa panen kelapa setiap 4 bulan dan masa panen tanaman cengkeh dan pala serta tanaman hortikultura atau umbi-umbian.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan luas lahan petani kelapa desa Apulea. Beberapa lahan yang diperoleh sebagai aset, merupakan warisan orang tua dan ada yang diperoleh berdasarkan usaha sendiri. Selain itu, proses panen kelapa membutuhkan waktu selama 4 bulan untuk memproduksi kopra. Istilah yang lebih akrab dikenal petani lokal ialah kuartal. Hambatan dalam proses produksi ialah kondisi geografis lingkungan perkebunan yang merupakan lereng perbukitan. Hal tersebut memengaruhi produktivitas usahatani kelapa. Oleh karenanya, praktik *makiriwo* sangat membantu dalam meringankan proses pengelolaan kelapa menjadi kopra. Pada perkebunan kelapa petani desa Apulea menunjukkan adanya sebuah kerentanan terhadap pendapatan petani disebabkan pengolahan kelapa yang menghasilkan kopra tidak dikerjakan secara optimal, selain itu pengerjaannya dilakukan secara tradisional.

Wijayanti *et al.* (2016), menyatakan bahwa modal sumber daya alam merupakan persediaan alam yang dihasilkan daya dukung dan nilai manfaat bagi penghidupan manusia yang terdiri dari penguasaan lahan dan produktivitas lahan, sumber daya air dan jasa lingkungan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2011) pada komunitas adat lokal PakPak di Dairi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam atas dasar kearifan tradisional, yang dikelola secara holistik, moralitas, praksis dan ekologis mampu menjamin

keberlanjutan ekologi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks petani desa Apulea, menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap modal sumber daya manusia oleh karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan, keterbatasan akses terhadap modal fisik karena tidak tersedianya infrastruktur dan transportasi penunjang aktifitas ekonomi petani yang berimplikasi pada keterbatasan modal finansial, maka petani desa Apulea memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan berbagai aktifitas mata pencaharian dengan menggunakan cara-cara tradisional sebagai upaya keberlanjutan penghidupannya.

Hal ini tampak dalam pemanfaatan sumber daya alam bukan saja sebagai petani kelapa, tetapi juga mempraktikkan strategi nafkah ganda rumah tangga dengan menanam tanaman produktif lainnya seperti tanaman pala, cengkeh dan tanaman hortikultura untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mata pencaharian sampingan sebagai nelayan juga dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup. Strategi mencapai keberlanjutan mata pencaharian juga ditentukan oleh kondisi lingkungan seperti perubahan iklim, kondisi geografi, dan ekosistem. Selain itu, lingkungan politik juga memengaruhi keputusan untuk menetapkan strategi mencapai keberlanjutan mata pencaharian. Hal-hal terkait dengan sistem politik, kebijakan dan kelembagaan juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi petani perkebunan kelapa dalam mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup.

Selanjutnya, kearifan lokal *makiriwo* yang diwariskan oleh generasi sebelumnya merupakan modal sosial petani kelapa di Desa Apulea yang mampu memperluas jejaring sosial, menumbuhkan nilai-nilai atas kepentingan bersama serta kepercayaan kepada sesama digunakan sebagai akses terhadap modal sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini tampak pada kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan perkebunan kelapa yang menghasilkan kopra, mulai dari pembersihan lahan, pekerjaan memetik buah kelapa, pekerjaan pemisahan daging kelapa dan proses pengangkutan dilakukan secara bersama-sama dengan pendekatan kearifan lokal yang disebut dengan *makiriwo* sebagai bentuk strategi bertahan hidup dalam memanfaatkan modal sumber daya alam dan modal sosial dalam bentuk nafkah ganda rumah tangga untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup.

Modal Finansial

Modal finansial merupakan salah satu modal yang amat penting. Modal ini merupakan modal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sumber utama modal keuangan petani desa Apulea adalah dari hasil penjualan kopra dalam satu kuartal (4 bulan). Rata-rata petani menghasilkan kopra sebanyak 1 – 2 ton dalam satu kuartal, pengusaha pengumpul membelinya dengan harga yang ditetapkan sendiri tidak disesuaikan dengan harga kopra yang dijual ke pedagang kopra utama (Tobelo). Harga kopra yang ditetapkan pengusaha pengumpul (pengepul) di desa Apulea sebesar Rp. 6.000/kg. Jika dihitung pendapatan petani pada hasil penjualan kopra dengan rata-rata 1,8 ton/kuartal yang dikerjakan oleh pemilik kebun kelapa maka 1.800 kg, dikalikan dengan harga yang ditetapkan Rp 6.000 maka penghasilan petani dalam satu kuartal sebesar Rp 10.800.000, sehingga jika dirata-ratakan pendapatan petani perbulan dapat dihitung dari total pendapatan satu kuartal sebesar Rp 10.800.00 kemudian dibagi 4 bulan maka, pendapatan petani perbulan sebesar Rp 2.700.000.

Sementara itu, apabila proses pengolahan kopra menggunakan tenaga kerja, maka hasil penjualan akan dibagi dua antara

pemilik lahan kebun kelapa dengan tenaga kerja tersebut. Dengan demikian hasil perhitungan penjualan kopra Rp 10.800.000 dibagi dua maka pendapatan petani dalam satu kuartal sebesar Rp 5.400.000, sehingga jika dirata-ratakan pendapatan petani kelapa perbulan dengan menggunakan tenaga kerja adalah Rp 5.400.000 dibagi 4 bulan maka pendapatan petani perbulan sebesar Rp 1.350.000. pendapatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, petani berhutang kepada pengusaha kopra (pengepul). Lebih jauh dapat dilihat hasil wawancara bersama Ribens Datty (64 Tahun)

Bahasa lokal : “*Nako ngomi maeoka mia pipi ka igono, jadi nako mia kebutuhan i mendakak misalnya ngoaka jo sakolah atau wo gogama paling ka pengusaha ika mimageje. Igono madugala sekarang maneoka Rp. 6.000 kilo moi nako wolega memang i cukup kawa apalagi nako nanga igono nyawa jaakana so woma kabage oka pasti icukup kawa belum lagi nanga nagimi wosi tutup*”.

Bahasa Indonesia: Petani Desa Apulea tidak memiliki modal (uang tunai) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga petani hanya mengandalkan alam dan pengusaha pengumpul (pengepul) kopra. Rata-rata harga kopra saat ini dibeli dengan harga Rp. 6000/ kg, kalau dilihat pasti tidak cukup belum lagi jika kebun kelapa dikerjakan oleh orang lain sudah tentu dibagi dua dengan pekerja, selain itu hasil pembagian tersebut dipotong hutang ke pengusaha pengepul maka sudah tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga jika ada kebutuhan mendesak seperti kebutuhan anak sekolah atau sakit dan kebutuhan lainnya maka harus berhutang kepada pengusaha kopra atau pengepul.

Menurunnya harga kopra berimplikasi pada ketidakmampuan petani untuk menggunakan tenaga kerja upahan serta berdampak pada ketidakmampuan petani menafkahi keluarga (biaya pendidikan sekolah anak dan kesehatan). Selain itu, masalah lain yang dihadapi petani kelapa ialah adanya hutang kepada pengepul kopra yang menyebabkan pendapatan dari hasil penjualan akan dikurangi jumlah hutang. Faktor-faktor tersebut menurunkan kuantitas dan kualitas hasil produksi serta memperkuat ketergantungan petani pada pengepul karena tidak berdaya dalam menetapkan harga kopra.

Pengelolaan perkebunan rakyat dipengaruhi oleh kondisi pasar dunia, harga yang selalu berubah, kepentingan politik pemerintah dan perusahaan swasta, serta ketergantungan. Faktor-faktor penentu keberlanjutan pengelolaan perkebunan rakyat tersebut saling memengaruhi satu dengan lainnya. Mengitsu (2015) menunjukkan adanya tantangan dalam strategi nafkah ganda yakni masalah administratif sumber daya komunitas yang mengalami kelangkaan. Sedangkan, Alboere (2018) berargumen bahwa strategi nafkah ganda merupakan norma dalam ekonomi di wilayah pedesaan yang berkembang menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Lebih jauh, Ewebiyi dan Meludu (2013) menunjukkan hambatan diversifikasi mata pencaharian rumah tangga di desa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, keterbatasan asset dan sistem transportasi yang buruk. Beberapa peneliti terdahulu, menghubungkan strategi nafkah ganda dengan pendekatan *livelihood* di wilayah pedesaan yang menekankan pada tindakan ekonomi dan perspektif kelembagaan (Belete, 2018; Gelan, 2018; Liu dan Lan, 2015; Gebreyesus, 2016; Robaa dan Tolossa, 2016). Meskipun demikian, masih terdapat kemungkinan adanya perbedaan perilaku sesuai konteks budaya

pada wilayah yang berbeda.

Ding *et al.* (2018) menghubungkan modal aset *livelihood* dengan strategi bertahan hidup komunitas penggembala dan menemukan bahwa akses terhadap asset sangat minim sehingga peningkatan kapasitas dapat mempermudah proses transisi rumah tangga untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Disisi lain, Pandey (2017) menunjukkan bahwa strategi nafkah ganda muncul akibat keterbatasan akses terhadap aset *livelihood*, sehingga membutuhkan intervensi kelembagaan berupa kebijakan untuk mencapai keberlanjutan. Su *et al.* (2018) menunjukkan adanya resiko ketidak berlanjutan apabila akses terhadap aset *livelihood* terhambat. Disisi lain, Nayak (2017) berargumen bahwa tidak selamanya akses terhadap aset *livelihood* menjamin keberlanjutan mata pencaharian keluarga, akan tetapi terdapat kemungkinan mata pencaharian keluarga tidak berkelanjutan meskipun akses terhadap modal sangat mungkin. Penelitiannya lebih menekankan pada perubahan-perubahan aspek kelembagaan yang justru menjadi penyebab ketidak berlanjutan mata pencaharian.

Beberapa peneliti terdahulu juga menunjukkan adanya peluang terjadinya transformasi kelembagaan nafkah. Seperti halnya, Mardiyansingih *et.al* (2018) dalam konteks Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Temuannya menunjukkan adanya perubahan pada aras kelembagaan akibat keterbatasan akses salah satunya perubahan ekologi kawasan hutan, dimana kelembagaan nafkah modern yang hadir menggantikan kelembagaan nafkah tradisional. Scott (1981) melihat komunitas desa mengatur kegiatan ekonomi rumahtangga masyarakatnya dengan mengadakan koordinasi melalui kelembagaan adat, oleh sebab itu aspek kultural menjadi sangat esensial dalam kelembagaan nafkah masyarakat lokal. Terlepas dari ekonomi ganda, Boeke (1953) masih relevan dengan konteks perubahan sosial di pedesaan, dimana masih banyak karakter masyarakat pra-kapitalis dengan sistem kelembagaan nafkah tradisional. Sementara itu, pemerintah, swasta dan LSM hadir dengan membawa karakter masyarakat kapitalis di pedesaan. Lebih jauh, Sellato (2007) melihat banyaknya program LSM maupun proyek pemerintah yang mempromosikan keswadayaan pada komunitas pedesaan justru menghasilkan hasil yang kurang efektif.

Pola nafkah ganda di pedesaan merupakan proses dimana rumahtangga membangun suatu kegiatan dan kapabilitas dukungan sosial yang beragam untuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Scott (1981) mengemukakan tiga strategi nafkah yang umumnya dilakukan masyarakat pedesaan yakni intensifikasi atau ekstensifikasi pertanian, diversifikasi nafkah serta migrasi baik secara sukarela maupun tidak. Selain itu, tindakan ekonomi merupakan proses yang dilakukan individu dalam relasi sosial sehingga tindakan ekonomi selalu melibatkan makna dan memperlihatkan kekuasaan yang melekat dalam jejaring atau hubungan interpersonal antar aktor yang didorong oleh kepentingan. Dalam konteks kehidupan petani, perilaku ekonomi yang terpinggirkan dalam tatanan komoditi tanaman komersial berimplikasi pada ketidakmampuan melakukan investasi. Petani yang hidupnya dekat dengan batas subsistensi cenderung mengutamakan apa yang dianggap aman dan dapat diandalkan daripada keuntungan yang diperoleh dalam jangka panjang.

Kelembagaan ekonomi lokal diperlukan untuk mengatur hubungan antar petani dan pemilik modal sekaligus pedagang (pengepul) sehingga berorientasi pada prinsip resiprositas. Hal tersebut dapat menjadi solusi atas pelbagai permasalahan kelembagaan ekonomi lokal sehingga berimplikasi pada

menurunnya kesejahteraan ekonomi petani dan meningkatnya kesenjangan antar lapisan. Dalam konteks ini, tindakan ekonomi menjadi faktor yang esensial. Swedberg (2003) berpendapat bahwa tindakan ekonomi didorong oleh suatu kepentingan sebagai kekuatan mendasar, selain itu kepentingan merupakan fenomena sosial yang direalisasikan melalui relasi sosial. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi permasalahan ketidakberdayaan petani kelapa akibat fluktuasi harga kopra yang berhubungan dengan faktor pengolahan seperti penggunaan tenaga kerja, pengadaan modal, bahan, alat, pemasaran dan pengembangan usaha. Dalam berbagai dimensi kepentingan, rasa keadilan yang terusik memunculkan perlawanan dari petani. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan strategi nafkah rumah tangga untuk meningkatkan taraf hidupnya dipengaruhi oleh kepentingan sosial. Dengan demikian, kolektifitas komunitas lebih penting daripada individu.

Pada kasus perkebunan kelapa di desa Apulea, menurunnya harga kopra berimplikasi pada ketidakmampuan petani untuk menggunakan tenaga kerja upahan serta berdampak pada ketidakmampuan petani menafkahi keluarga (biaya pendidikan sekolah anak dan kesehatan). Selain itu, masalah lain yang dihadapi petani kelapa ialah adanya hutang kepada pengepul kopra yang menyebabkan pendapatan dari hasil penjualan akan dikurangi jumlah hutang. Faktor-faktor tersebut menurunkan kuantitas dan kualitas hasil produksi serta memperkuat ketergantungan petani pada pengepul karena tidak berdaya dalam menetapkan harga kopra. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa rakyat mengalami kemunduran sehingga menimbulkan gejala kemiskinan dan perilaku ekonomi yang terpinggirkan dalam tatanan komoditi tanaman komersial di Desa Apulea, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sumber kemiskinan petani kelapa berawal dari penguasaan modal pada tatanan kelembagaan ekonomi lokal. Ketimpangan penguasaan modal antar lapisan, menentukan keberlanjutan mata pencaharian petani.

Keberhasilan usahatani sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi seorang petani yakni prestasi ekonomi, meskipun demikian pengelolaan kebun juga cukup dipengaruhi oleh kondisi kekuatan luar seperti pasar dunia yang menentukan naik turunnya harga kopra. Selain itu, perilaku petani dalam pengelolaan perkebunan rakyat menunjukkan adanya indikasi tindakan rasional instrumental yang didasari nilai untung rugi secara ekonomi. Dalam kondisi tekanan ekonomi, petani semakin tidak mandiri dalam pengembangan usaha. Dalam konteks Desa Apulea, kelembagaan ekonomi lokal atau kelembagaan tradisional permodalan dan pemasaran yang dikenal sebagai pedagang pengumpul (Pengepul), justru memperkuat ketergantungan petani melalui hutang. Hal ini menunjukkan adanya tindakan ekonomi petani dalam jejaring sosial yang secara ekonomi berdampak negatif tetapi menguntungkan pada sisi sosial. Dengan demikian, petani kelapa semakin tidak berdaya menghadapi masalah keterbatasan akses meningkatkan finansial.

Kelembagaan yang baru seperti koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih relatif rendah. Selain itu, belum efektif untuk dapat bersaing dengan pengepul karena keterbatasan mengakses modal serta keterbatasan akses sumber daya manusia. Meskipun demikian, manfaat yang dirasakan petani ialah manfaat sosial yakni intensitas hubungan sosial antar petani. Tatanan kelembagaan ekonomi lokal masih berdasarkan "kesepakatan" antara petani dan pengepul, meskipun demikian tidak ada keterbukaan dalam penentuan harga dan penetapan harga kopra. Petani kelapa hanya berpatokan pada harga yang

ditetapkan oleh pengepul tetapi tidak pernah tahu harga resmi yang berlaku. Adapun, harga kopra di Desa Apulea berbeda dengan desa lainnya, meskipun dalam kabupaten yang sama. Petani kelapa hanya bisa mengeluh dengan adanya perbedaan harga tanpa mengetahui hal-hal yang membedakan harga kopra tersebut. Tatanan kelembagaan ekonomi lokal telah membentuk mekanisme sosial sehingga tekanan ekonomi tidak melanggar subsistensi petani. Kesempatan meminjam uang yang diberikan pengepul kepada petani seakan menjadi asuransi sosial untuk keberlanjutan mata pencaharian. Meskipun demikian, petani menanggung hutang yang cukup banyak sehingga terbatas memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dengan demikian, mekanisme tersebut diakui memberi peluang mobilitas sosial untuk meningkatkan kesejahteraan melainkan merugikan petani.

Rasa ketidakadilan karena keterbatasan akses petani untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguasaan modal terjewantahkan dalam aksi demonstrasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara untuk memperhatikan ketimpangan sosial tersebut, meskipun demikian kekuatan luar menjadi penentu harga kopra sehingga tekanan ekonomi sejak krisis ekonomi Indonesia seakan tidak mengalami perubahan dengan pedesaan di daerah perbatasan Indonesia-Philipina khususnya Desa Apulea. Sejauh ini, upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tekanan ekonomi petani dilakukan dengan membangun akses transportasi secara merata ke seluruh pedesaan di Kabupaten Halmahera Utara. Indikasi perbedaan harga kopra dipengaruhi oleh hambatan akses transportasi pengepul di Desa Apulea untuk mendistribusikan kopra ke ibu kota Kabupaten. Dengan demikian, upaya menyediakan aksesibilitas dan transportasi diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi aras kabupaten.

Modal Fisik

Modal fisik merupakan kebutuhan mendasar dalam mendukung kelancaran aktifitas masyarakat berupa infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud adalah barang publik yang dapat diakses semua orang tanpa biaya. Dalam konteks Desa Apulea, terdapat hambatan dalam memanfaatkan modal fisik berupa sarana prasarana seperti jalan, jembatan, transportasi dan komunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya untuk mengakses semua hasil usaha dan aktivitas masyarakat Desa Apulea ke ibu kota kabupaten (Tobelo) sebagai pusat ekonomi masyarakat menggunakan kapal laut milik swasta, sedangkan untuk menghubungkan antara desa yang satu dengan desa lainnya hanya menggunakan motor *jonzon/ longboard*. Selain itu, petani desa Apulea tidak memiliki teknologi modern dalam menghasilkan kopra sebagai salah satu komoditi utama dalam keberlanjutan kehidupannya, tetapi hanya menggunakan peralatan seadanya yang dilakukan secara tradisional. Peralatan tersebut berupa: parang, sabit, *bika* (lonjong), karung, *kore-kore* (alat pengeruk daging kelapa), dan *para-para* (tempat pengasapan daging kelapa).

Parang, dipakai untuk melepaskan kelapa dari tandannya, Sanggut/sabit digunakan sebagai alat pembersihan arel kebun kelapa atau membuang gulma (rumpun dan ilalang), *bika* (lonjong) yaitu sejenis keranjang berbahan rotan dan digunakan dengan cara menggendong di bagian belakang, sebagai alat pengumpul buah kelapa, *kore-kore* (alat pengeruk sesebagai pemisah daging kelapa dari tempurung) dan karung (tempat pengepakan daging kelapa pada saat pengerjaan proses pemisahan daging kelapa dan tempurung atau kopra apabila sudah dilakukan proses pengasapan atau pengeringan), *para-para* (tempat pengasapan daging kelapa) sebagai tempat pengasapan kopra berbentuk

rumah panggung yang bahan-bahan terbuat dari bambu. Untuk mengangkut kopra dari para-para (tempat pengasapan kopra), terkadang petani langsung mengangkat dengan tenaganya sendiri dengan cara memikul yaitu meletakkan kopra pada punggungnya ataupun dengan menggunakan jasa angkut orang lain yang memiliki kendaraan roda dua, kemudian dibawa ke gudang pengusaha atau pengepul karena petani tidak memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan kopra. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara bersama Rein Terere (72 Tahun) 9 Oktober 2017 di Areal Perkebunan Kelapa :

Bahasa Lokal (Desa Apulea): *“Maneoka mamasalah ka perhubungan bolo! maruka daku joku oka de wosi guti nege ko wokangelas karena mene ja tetede meiasi, tapi nako de ngekomo magilamoko demenaka bisa saja ja tede okia alat, jadi ngomi mane mi temo ngekomo mane harus isi mana la nanga ekonomi de barang yang wa ojo-ojomo mane de nanga gina ka wa noa uku de alat ja tede, nako ua bole mane mangoe de cuman karena ngekomo meia to, jadi wokangela jadi paling penting mane perhubungan. Nako ua mia hasil maneoka akumu de i supu oka kota ika, maruka bole, gugumuni, sibi, kastela tapi karena ma perhubungan mane i susa to jadi ka dai o matengo ai wola jambatan masonoa isa, so ka una ika mimabubukumu, jadi manege ngina-ngina manga usaha bolo”.*

Bahasa Indonesia: “Masalah utamanya adalah perhubungan atau akses jalan, kebun saya terletak di daerah pegunungan sehingga proses panen cenderung lebih sulit kalau tidak tersedia jalan. Saya butuh jalan bahkan jembatan untuk mengangkut hasil panen, susah bagi kami untuk mengangkut hasil panen kalau tidak ada jalan atau alat yang dapat meringankan beban kerja kami. Kami berharap akan dibangun jalan untuk mempermudah usaha kami”.

Petani kelapa di Desa Apulea dalam menghasilkan kopra masih menggunakan cara-cara tradisional menggunakan peralatan seadanya, menunjukkan bahwa petani kelapa di Desa Apulea masih belum memiliki pemahaman terkait dengan inovasi produk berbahan dasar kelapa maupun pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan proses produksi kopra yang berkualitas, selain itu infrastruktur berupa jalan, jembatan dan transportasi lainnya bahkan komunikasi yang tidak memadai, sehingga kesulitan dalam mengakses hasil pertanian.

DFID (1999) menyampaikan bahwa asset fisik adalah infrastruktur dasar dan barang-barang yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. selain infrastruktur, asset fisik juga meliputi kepemilikan peralatan dan sarana prasarana untuk kegiatan produksi. Ewebiyi dan Meludu (2013) menunjukkan hambatan diversifikasi mata pencaharian rumah tangga di desa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, keterbatasan asset dan sistem transportasi yang buruk. Dalam konteks kewilayahan, sarana prasarana dapat berupa infrastruktur jalan, irigasi maupun akses terhadap informasi dan komunikasi (Scoones, 1998).

Hal ini menunjukkan pula adanya indikasi hambatan akses terhadap modal manusia yakni keterampilan untuk menghasilkan produk yang unggul. Selain itu, keterbatasan akses modal fisik berupa sarana dan prasarana penunjang atau teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kopra maupun dalam bertransaksi, sebab modal fisik merupakan salah satu penunjang kehidupan masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum dan penunjang kehidupan diukur untuk melihat sejauh mana masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendukung mata pencaharian karena ketersediaan fasilitas akan mempengaruhi kemampuan orang untuk mendapatkan

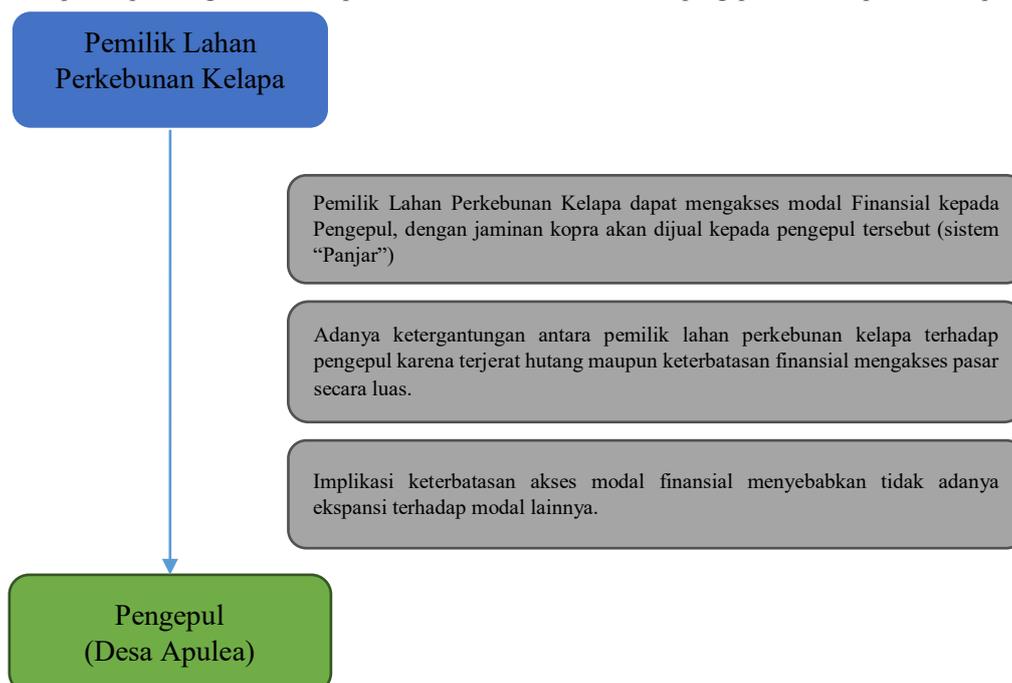
kehidupan yang layak.

Dalam hubungan dengan kearifan lokal petani Desa Apulea, interaksi sosial dalam praktik *makiriwo* sebagai nilai-nilai budaya yang dikonstruksi secara kolektif tentang kehidupan sosial bermasyarakat. Lingkungan sosial komunitas yang terisolir karena keterbatasan akses transportasi dan komunikasi, justru memberikan ruang bagi penguatan kelembagaan lokal dalam konteks *makiriwo*. Hal ini tampak pada kegiatan kerja sama pengangkutan kopra dari tempat pengasapan yang berada di perkebunan kelapa ke gudang pengepul dilakukan bersama oleh pemilik kopra dan anggota kelompok lainnya hanya bermodalkan kekuatan fisik manusia, dengan cara memikulnya diatas punggung. Hal ini menunjukkan adanya motivasi implementasi yang dilandasi oleh prinsip hidup dalam peribahasa “Berat sama dipikul, ringan sama di jinjin”.

Modal Sosial

Ada banyak pandangan tentang modal sosial sesuai dengan konteks yang ditempatkan oleh masing-masing peneliti terdahulu. Putnam (1993) menempatkan modal sosial pada konteks institusi, sementara Coleman (1990) pada aspek individu. Uphoff (1999) menekankan adanya hubungan antara modal sosial dengan pembangunan. Modal sosial juga dipandang sebagai kontrol sosial, dukungan keluarga dan jejaring, Portes (2000) untuk mencapai keberlanjutan matapencapaian, Baker (2000) menekankan pada kepemilikan asset pribadi. Selain itu, DeFilippis (2001) menempatkan modal sosial sebagai hubungan sosial. Lebih jauh, Grootaert dan Bastelaer (2001) berpandangan bahwa modal sosial dapat dilihat pada aspek mikro, meso maupun makro yang disesuaikan dengan konteks kelembagaan maupun norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Nakagawa dan Shaw (2004) menempatkan kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sebagai unsur utama dalam aktivitas ekonomi. Tirmizi (2005) mengkaji hal-hal terkait dengan modal sosial dalam komunitas yakni partisipasi, kepemimpinan, kelembagaan ekonomi, serta tindakan kolektif.

Dalam rekonstruksi paham pembangunan, menempatkan modal



Gambar 5. Interaksi Sosial Pemilik Lahan Perkebunan Kelapa dan Pedagang Pengumpul

sosial sebagai ketahanan dalam membangun kekuatan kolektif untuk mencapai aspek keberlanjutan. Adapun, Inayah (2012) memandang modal sosial sebagai komunikasi atau interaksi antarindividu dan kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Wood *et al.*, (2013) menunjukkan bahwa modal sosial merupakan masalah fundamental dalam proses informal dan formal untuk membangun ikatan yang kuat dalam rekonseptualisasi struktur sosial masyarakat. Lebih jauh, modal sosial menjadi nilai yang relevan dalam konteks pemerintah, pengambilan kebijakan, kesehatan, komunitas masyarakat, manajemen resiko, maupun keberlanjutan lingkungan. Sedangkan, Bock dan Macke (2014) menempatkan modal sosial sebagai elemen penting dalam kolaborasi antar aktor. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis pemanfaatan modal sosial dan modal ekonomi untuk keberlanjutan mata pencaharian.

Dalam studi kasus penelitian ini, modal sosial nampak dalam ikatan sosial dan budaya tidak hanya terjalin antar petani atau pemilik lahan perkebunan kelapa dalam kelompok kerja, melainkan juga antara petani dengan pedagang pengumpul (pengepul). Meskipun demikian, ikatan sosial antara petani dan pengepul terbentuk bukan karena praktik *makiriwo* melainkan karena kesempatan yang diberikan pengepul terhadap petani untuk berhutang. Secara tidak langsung, pengepul berupaya mengakses modal sosial dengan memperluas jejaring sosial dengan petani meskipun memiliki tujuan untuk memperoleh pasar. Adapun, kesempatan mengakses modal yang diberikan pengepul kepada petani dalam bentuk hutang merupakan kepercayaan yang diberikan untuk memperkuat jejaring serta menumbuhkan nilai-nilai atau norma di kalangan masyarakat akibat rasa hutang budi.

Dalam konteks Desa Apulea, kearifan lokal *makiriwo* menjadi mobilisator modal sosial petani untuk mengakses modal ekonomi. Selain itu, pengepul menyediakan kesempatan berhutang bagi petani untuk mengakses modal sosial dan meningkatkan akumulasi modal ekonomi secara bersamaan.

Interaksi pemilik lahan perkebunan kelapa dengan pedagang pengumpul di Desa Apulea tidak menunjukkan adanya konflik. Keberadaan pengepul di Desa Apulea mendapat respon baik dari

pemilik lahan perkebunan kelapa karena adanya kesempatan untuk berhutang bagi petani yang disediakan pengepul. Kesempatan tersebut mampu menjawab kebutuhan ekonomi petani yang mendesak. Meskipun pemilik lahan perkebunan kelapa menyadari bahwa hal tersebut bersifat transaksional, dimana secara tidak langsung pengepul tengah berupaya untuk menguasai jejaring bisnis penjualan kopra di Desa Apulea. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara petani dan pengepul dalam aspek ekonomi menunjukkan sifat transaksional sedangkan dalam konteks sosial bersifat saling menguntungkan. Respon positif terhadap tindakan ekonomi pengepul juga disebabkan oleh keterbatasan ekonomi pemilik lahan perkebunan kelapa untuk mengakses pasar di ibukota Kabupaten Halmahera Utara akibat belum tersedianya aksesibilitas transportasi dan komunikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asset *livelihood* memiliki peran yang sangat esensial bagi masyarakat di Desa Apulea. Pemanfaatan modal sosial paling dominan jika dibandingkan dengan modal lainnya. Pengelolaan perkebunan rakyat seyogyanya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Meskipun demikian, bagi desa terpencil khususnya di wilayah perbatasan yang terisolir (tidak ada akses jalan, transportasi yang memadai dan akses komunikasi) maka kearifan lokal menjadi strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup komunitas. Strategi bertahan hidup yang dimaksud dapat berupa nafkah ganda rumah tangga maupun optimalisasi kelembagaan ekonomi lokal. Kehidupan petani perkebunan kelapa di Desa Apulea menunjukkan adanya potensi kemiskinan apabila akses terhadap modal sosial dan sumber daya alam tidak dimanfaatkan, dan akses terhadap modal manusia, modal fisik serta modal finansial tidak diakomodir. Diperlukan intervensi kelembagaan ekonomi lokal untuk meningkatkan produktivitas petani kelapa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal makiriwo terjewantahkan dalam modal sumber daya alam dan modal sosial yang dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup ditengah hambatan akses terhadap modal finansial, modal fisik dan modal manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Alboere, A. 2018. Review on Determinants of Sustainable Rural Livelihood Diversification of Small Holder Farmer in Ethiopia. *International Journal of Advanced Research*, Vol 6(2) : 251-259. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1197864>

Anwar, A. 2017. Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa. *Jurnal Economia*, Vol 13 (1): 79-94. (Internet). 18 Januari 2019. Diunduh dari: https://www.researchgate.net/profile/Aminuddin_Anwar/publication/317115063

Baker, E. 2000. Social Capital, Collective Action, and Adaptation to Climate Change. *Economic Geography*, Vol 79(4): 387-404.

Barro, R. J. 1991. Economic Growth in a Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407-443. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: <https://www.academic.oup.com>

Belete, A. 2018. Determinants of Rural Household's Livelihood Strategies in MachakelWoreda, East Gojjam Zone, Amhara Nation Regional State, Ethiopia. *Developing Country Studies*, Vol 8(10) : 1-6. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: <https://www.iiste.org>

Bock, A., Macke. J. 2014. The Social Capital and the Development of Collaborative Networks.

RevistaBrasileira de PesquisaEmTurismo. Vol 8(1) : 23-41. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: <https://www.redalyc.org>

Boeke, J. 1953. *Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*. 1982. Bunga Rampai Perekonomian Desa. Bogor : Yayasan Obor Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.

Chambers, R. 1995. 'Poverty and Livelihoods : Whose Reality Counts ?', Discussion Paper 347. Brighton, UK : Institute of Development Studies.

Chambers, R., Conway, G.R. 1992. 'Sustainable Rural Livelihoods : Practical Concepts for the 21 Century's', Discussion Paper 296. Brighton, UK : Institute of Development Studies.

Coleman, S. 1990. *Foundation of Social Theory*. *Foundations of Social Theory*, Vol 69 (2) : 993.

Creswell, J. W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

DeFilippis, J. 2001. The Myth of Social Capital in Community Development. *Housing Policy Debate*, Vol 12(4): 781-806. (internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10511482.2001.19521429>

DFID. 1999. *Sustainable Livelihoods Guidance Sheet*. Department for International Development (DFID), London.

Ding, W. et al. 2018. Influence of Livelihood Capitals on Livelihood Strategies of Herdsmen in Inner Mongolia, China. *Sustainability*, Vol 10(9): 3325. (internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: <https://doi.org/10.3390/su10093325>

Elis, F. 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. New York [US] : Oxford University.

Emzir. 2012. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers

Ewebiyi, I., Meludu, N. 2013. Constraints to Livelihood Diversification Among Rural Households in Southwestern Nigeria. *Global Approaches to Extension Practice : A Journal of Agricultural Extension*, Vol 9 (1): 64-77. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: <https://www.ajol.info/index.php/gaep/article/view/119264>

Gebreyesus, B. 2016. The Effect of Livelihood Diversification on Household Income : Evidence from Rural Ethiopia, *International Journal of African and Asian Studies*, Vol 20(1): 1-12. (Internet). 15 Januari 2019. Dinduh dari: <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JAAS/article/view/29962>

Gelan, D. 2018. Livelihood Diversification Determinants in the Teff Growing Area of East Shoa Zone of Oromia Region, Ethiopia. *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol 8(23): 9-18. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/view/45597>

Grootaert, C., Bastelaer, T. 2001. *Understanding and Measuring Social Capital : A Synthesis of Findings and Recommendations from the Social Capital Initiative*. Social Capital Initiative Working Paper, Vol 24(24): 1-31.

Hidayat. 2011. *Pengelolaan Sumber daaya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*. *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA*, Vol. XV, No. 1: 2011: 19-32

Inayah. 2012. Peran Modal Sosial dalam Pembangunan. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol 12(1) : 43-47

Liu, Z., Lan, J. 2015. The Sloping Land Conversion Program in China : Effect on the Livelihood Diversification of Rural Households. *World Development*, Vol 70(1): 147-

161. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: <https://curis.ku.dk/portal/da/publications/the-sloping-land-conversion-program-in-china>
- Mankiew, N. G. *et al.* (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107, 407-437.
- Mardiyarningsih, D. *et al.* 2010. Dinamika Sistem Penghidupan Masyarakat Tani Tradisional dan Modern di Jawa Barat. *Jurnal Sodality*, Vol 4(1) : 116-145.
- Mardiyarningsih, D. *et al.* 2018. Transformasi Kelembagaan Nafkah Pada Komunitas Dayak Punan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. *Jurnal Sodality*, Vol 6(2) : 163-174.
- Maridi. 2011. Modal Manusia untuk Konservasi Waduk Wonogiri : Studi Kasus di Sub Daerah Aliran Sungai Keduang. *BIOEDUKASI*, Vol. 4, No.2, hal. 86-94. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: <http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/biologi/article/view/881>
- Mengistu, S. 2015. Challenges of Livelihood Diversification in Pastoral Lands of Ethiopia Evidence From South Omo Pastoralists. *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol 4(8) : 147-153. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: <http://www.ijstr.org/final-print/sep2016/Challenges-Of-Livelihood-Diversification-In-Pastoral-Lands-Of-Ethiopia-Evidence-From-South-Omo-Pastoralists.pdf>
- Moleong, L. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nakagawa, Y., Shaw, R. 2004. Social Capital : A Missing Link to Disaster Recovery. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, Vol 22(1) : 5-34. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: https://www.researchgate.net/profile/Rajib_Shaw/publication/255659714_Social-Capital-A-Missing-Link-to-Disaster-Recovery.pdf
- Nayak, P. 2017. Fisher Communities in Transition : Understanding Change from a Livelihood Perspective in Chilika Lagoon, India. *Maritim Studies*, Vol 16(1): 1-33. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: <https://doi.org/10.1186/s40152-017-0067-3>
- Pandey, R. 2017. Life and Livelihoods in the Forbidden Kingdom, the Trans-Himalaya Nepal. *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, Vol 11(1): 24-59. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: https://www.researchgate.net/profile/Rishikesh_Pandey8/publication/322159938_Life-and-Livelihoods-in-the-Forbidden-Kingdom-the-Trans-Himalaya-Nepal.pdf
- Pemerintah Desa Apulea. 2005. RPJM Desa Apulea 2015-2020.
- Portes, A. 2000. Social Capital : Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Knowledge and Social Capital*. Boston : Butterworth-Heinemann
- Putnam, D. 1993. The Prosperous Community : Social Capital and Public Life. *The American Prospects*, Vol 13(13): 35-42.
- Robaa, B., Tolossa, D. 2016. Rural Livelihood Diversification and its Effects on Household Food Security : A Case Study at Damota Gale Woreda, Wolayta, Southern Ethiopia. *Eastern Africa Social Science Research Review*, Vol 32(1): 93-118. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: <http://www.ajol.info/index.php/eassrr/article/view/131508>
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: <https://www.jstor.org/stable>
- Scoones, I. 1998. *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis*. IDS Working paper, 72. Brighton.
- Scott, J.C. 1981. Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LPE3ES, Jakarta.
- Sellato, B. 1994. *Nomads of the Borneo Rainforest : The Economics, Politics, and Ideology of Settling Down*. Honolulu : University of Hawai Press.
- Semiring, S., Dharmawan, A. 2014. Resiliensi Nafkah Rumah Tangga Petani di Kawasan Rawan Bencana ROB Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. *Jurnal Sodality*, Vol 2(1): 30-42
- Sistem Informasi Geografi. 2015. Peta Administrasi Kecamatan Loloda Utara. (Internet). 5 September 2017. Diunduh dari : <https://www.google.co.id/peta+administratif+kabupaten+halmahera+utara+2017+pdf>
- Su, F. *et al.* 2018. Relationship Between Livelihood Risks and Livelihood Capitals : A Case Study in Shiyang River Basin China. *Sustainability*, Vol 10(2): 509. (Internet). 15 Januari 2019. Diunduh dari: <https://doi.org/10.3390/su10020509>
- Sumarti, T. 2007. Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda Rumahtangga Pedesaan. *Jurnal Sodality*, Vol 1(2): 217-232.
- Swedberg, R. 2003. *Principles of Economic Sociology*. Princeton University Press. Newjersey, US.
- Tirmizi, A. 2005. *The Contribution of Levels of Social Capital to Community Development*. Iowa State University.
- Uphoff, N. 1999. *Understanding Social Capital : Learning from the Analysis and Experience of Participation*. *Social Capital : A Multifaceted Perspective*, pp 215.
- Wijayanti, *et al.* 2016. Strategi Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol 4 (2) : 133-152. (Internet). 19 Januari 2019. Diunduh dari: <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php>
- Wood, J. *et al.* 2013. *How Communities Cope and Adapt : A Social Perspective*, pp. 141-169.